

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Merujuk pada Surat Keputusan Direksi Nomor KN.11/2020 tentang Panduan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pasal 21 bahwa setiap barang dan/atau jasa yang diserahkan oleh mitra atau vendor dalam negeri harus dilakukan pemeriksaan fisik atau pengujian fungsi sesuai dengan ketentuan berikut, di antaranya :

Pemeriksaan barang niaga yang diserahterimakan di gudang perusahaan atau gudang mitra dilakukan pemeriksaan oleh fungsi Incoming Good Inspection (IGI) yang menghasilkan Laporan Pemeriksaan Barang (LPB). Pemeriksaan barang non-niaga dilakukan oleh unit kerja yang menerbitkan Purchase Requisition (PR) dengan menghasilkan Laporan Pemeriksaan Barang (LPB).

Pemeriksaan jasa non-niaga dilakukan oleh unit kerja yang menerbitkan Purchase Requisition (PR) dengan menghasilkan Laporan Pemeriksaan Jasa (LPJ) atau Berita Acara Uji Terima (BAUT).

Pemeriksaan jasa niaga dilakukan oleh unit kerja yang menerbitkan Purchase Requisition (PR) dengan menghasilkan Laporan Pemeriksaan Jasa (LPJ) atau Berita Acara Uji Terima (BAUT)

Semua barang dan jasa yang telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan diterima selanjutnya dilaksanakan penerimaan melalui aplikasi System Application and Product (SAP) yang menghasilkan form Good Receipt (GR) untuk pengadaan barang dan Service Acceptance (GR) untuk pengadaan jasa yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

Pembayaran atas transaksi pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh fungsi keuangan, kecuali untuk pengadaan langsung dapat dilakukan oleh unit organisasi terkait secara langsung.

PT INTI (Persero) tidak memiliki mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pencairan dana. PT INTI (Persero) memiliki mekanisme bahwa pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam *Purchase Order* dan Kontrak Pengadaan.

Proses pencairan dana terhadap mitra yaitu dengan melampirkan dokumen penagihan yang berisi :

1. *Purchase Order*
2. *Invoice* asli
3. Berita Acara Serah Terima (BAST)
4. Laporan Pemeriksaan Barang yang dilengkapi dengan GR atau SA

Rincian dokumen tersebut digunakan sebagai kelengkapan untuk permintaan pembayaran terhadap mitra atau vendor sekaligus menjadi dasar surat perintah pencairan dana.

Jika seluruh dokumen telah lengkap, maka fungsi keuangan akan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum dalam *Purchase Order* dan Kontrak Pengadaan.

Selain mekanisme tersebut, PT INTI (Persero) pun memiliki prosedur Berita Acara Pembayaran untuk pengajuan pencairan dana seperti yang tercantum pada dokumen terlampir.



Bandung, 23 Agustus 2023

Nomor : 2260/KU.03/030200/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth,

Dengan Hormat,
Menunjuk Surat Perjanjian Nomor K.TEL.006846/HK.810/SSP-10400000/2022 Tanggal 16 September 2022 tentang Pengadaan dan Pemasangan OSP Fiberisasi Node-B Telkomsel Tahap 4 Rekon 8, dengan ini kami sampaikan permohonan pembayaran OSP Fiberisasi Node-B Telkomsel Tahap 4 Rekon 8 sebagai berikut :

Jumlah :

Kepada :
No. Rekening :
Bank :
Alamat :

Untuk melengkapi Surat Permohonan Pembayaran ini, kami lampirkan dokumen pendukungnya.

Demikian perihal ini disampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

LD-KG

Kantor Pusat :
Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung 40253
E-mail : info@inti.co.id

Pabrik :
Jl. Moch. Toha No. 225
Palasari - Bandung 40258

Kantor Cabang Jakarta :
Jl. Balitung 1 No.17 (Senopati)
Jakarta Selatan 12110



PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253 , Telepon : (022) 5201501 (10 sal), Fax, (022) 5224636

KWITANSI

No. : 1800000606/08/2023

Sudah terima uang dari

Terbilang

Untuk pembayaran

BANYAKNYA Rp

PT INC

Pembayaran dengan cheque dianggap sah, setelah cheque tersebut
dapat diuangkan (clearing)

**PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**

Kantor Pusat

: Jalan Moch. Toha 77, Bandung 40253, Telepon : (022) 5201501 (10 Saluran), Fax : (022) 5202444

<http://www.inti.co.id> e-mail : info@inti.co.id

Cabang Jakarta

: Menara MTH Lantai 7, Suite 706-707 Jl. M.T. Haryono Kav. 23 Jakarta Selatan 12820

Telp (021) 22833799

Nomor Invoice : 1800000606/08/2023

Kontrak : K.TEL.006846/HK.810/SSP-10400000/2022

Tanggal : 16.09.2022

Nama Project : PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP
FIBERISASI NODE-B TELKOMSEL TAHAP 4

Tagihan 85%

NO	Uraian	Qty	Nilai
1	OSP FIBERISASI NOBE-B TELKOMSEL TAHAP 4 Rekon 8	-	Rp
	Lokasi : Ketapang	-	
2	Uang Muka 15%	-	Rp
DPP			Rp
PPN 11%			Rp
Jumlah			Rp

Terbilang :

No. Dokumen : TEL.0893/LG.320/DID-A0000000/2023

.0)

Bank Account :

PT Industri Telekomunikasi Indonesia

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, KC Perintis Kemerdekaan

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.3 BANDUNG 40117

Rekening No : 0022851774 (IDR)

SWIFT Code. BNINIDJA

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.009-23.75362404		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA Alamat : JL MOCHAMMAD TOHA NO 77 , KOTA BANDUNG NPWP : 01.001.672.3-051.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat NPWP		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TAGIHAN 85% PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FIBERISASI NODE-B TELKOMSEL TAHAP 4 REKON 8, KONTRAK NO : K.TEL.006846/HK.810/SSP-10400000/2022 TANGGAL 16/09/2022 Rp 3.006.828.634 x 1	
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPN		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA BANDUNG, 23 Agustus 2023



PBD23-1800000606-410000

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR

KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56 LT. 12-13 JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.56 Jakarta Selatan Jakarta

TELEPON (021) 22775100 FAKSIMILE (021) 22775088

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK

2023

Diterbitkan untuk PKP :

NPWP : 01.001.672.3-051.000

Nama : PT. INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Surat Pemberitahuan DJP

No : S-
499/PPN.NSFP/WPJ.19/KP.0303/2023
Tgl : 27 Juni 2023

Surat Permohonan PKP

No : PEM-
613080604/010016723/051/2023

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri
Faktur Pajak sebanyak 185 dimulai dari :

sampai dengan

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 27 Juni 2023 UNTUK TAHUN 2023 .
2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.



Lampiran V A
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: PER-24/PJ/2012
Tanggal : 22 November 2012

Format Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/Kuasa yang berwenang menandatangani Faktur Pajak Standar

Kepada Yth,

Dengan ini, saya:

Nama : TRI HARTONO Rianto
Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN
Nama PKP : PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
NPPKP : S-18PKP/WPJ.19/KP.0303/2017
Tanggal Pengukuhan : 04-08-2017

Memberitahukan identitas dan contoh tanda tangan Pejabat/Kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak Standar, yaitu:

No	Nama Pejabat/Kuasa yang ditunjuk	NPWP	Jabatan	Tanggal Mulai menandatangani	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Contoh Tanda Tangan
1	RACHMAT SUGIARTO	07.665.826.9-424.000	Manager Perpajakan	16/11/2020	Jl. MOCH TOHA NO. 77 BANDUNG	
2	ASTIRA APRILIA	66.641.233.3-423.000	Senior Officer Perpajakan	16/11/2020	Jl. MOCH TOHA NO. 77 BANDUNG	
3	IKHSAN RAMDHANI	54.355.357.2-429.000	Senior Officer Perpajakan	16/11/2020	Jl. MOCH TOHA NO. 77 BANDUNG	

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Pemberitahuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian sa

Bandung, 11 November 2020

1

TANDA TERIMA GAMBAR AKHIR PELAKSANAAN

PROYEK	: Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node-B Telkomsel Tahap-4
KONTRAK	: K.TEL.006846/HK.810/SSP-10400000/2022, Tgl 16-Sep-2022
DRM-1	: TEL.235/LG.231/DID-A0000000/2022, Tgl 10-Okt-2022
DRM-2	: TEL.366/LG.231/DID-A0000000/2022, Tgl 27-Des-2022
DRM-3	: TEL.132/LG.231/DID-A0000000/2023, Tgl 24-Mei-2023
WITEL	: PONTIANAK
LOKASI	: STO KETAPANG SITE ID : KTP121
PELAKSANA	: PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Pontianak, telah dilaksanakan penyerahan gambar hasil akhir pelaksanaan (*As Built Drawing*) untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fiberisasi Node-B Telkomsel Tahap-4, STO KETAPANG SITE ID : KTP121, sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi untuk lokasi KTP121.

Demikian Berita Acara penyerahan Gambar Akhir Pelaksanaan ini dibuat dalam kondisi sadar dan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PONTIANAK 31 JULI 2023